

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang terdapat wilayah tersebut dan membentuk pola kemitraan dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang rendah antar penduduk, antar daerah dan antar sektor merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administrasi dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan mensesuaikan laju pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan (Zuhri, 1998).

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang meningkat apabila tingkat kegiatannya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Para ahli menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, namun juga bersifat

immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenang yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, namun juga harus dapat menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

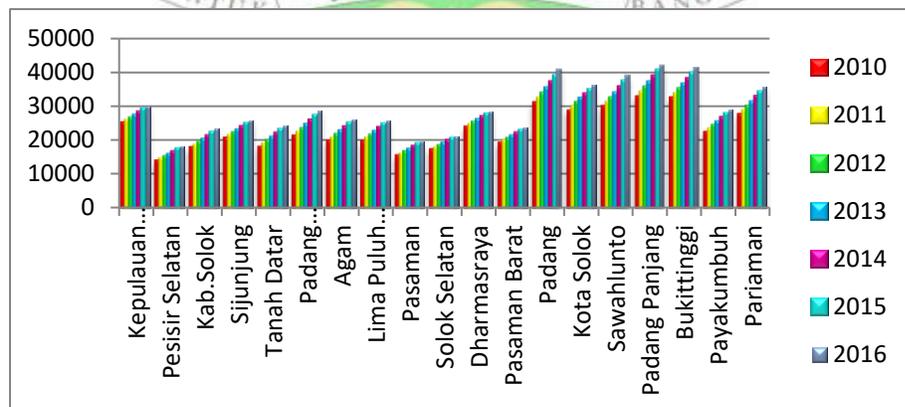
Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia berbeda-beda (Wijaya, 2001). Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk tumbuh dan yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh secara cepat sementara wilayah lainnya tumbuh secara lambat. Selanjutnya, kemampuan untuk tumbuh yang berbeda ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari sudut pandang pembangunan nasional menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah hal yang sangat dihindari karena menimbulkan berbagai kerugian daripada keuntungan atau manfaat (Wijaya, 2001).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan karakteristik wilayah Indonesia dalam hal kepemilikan Sumber Daya, kondisi sosial dan budaya serta letak demografis wilayah tersebut. Ketimpangan antar daerah merupakan salah

satu permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi, namun beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama dikarenakan kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan investor lebih memilih daerah perkotaan daripada daerah perdesaan. Di samping itu juga terdapat ketimpangan redistribusi pembangian pendapatan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada Kabupaten/Kota (Kuncoro, 2004).

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Tulus, 2011). Pada tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa yang tersebar di 33 provinsi. Provinsi Sumatera Barat yang hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 4.846.909 jiwa dari total jumlah penduduk di Indonesia tetap saja mengalami ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penyebaran penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

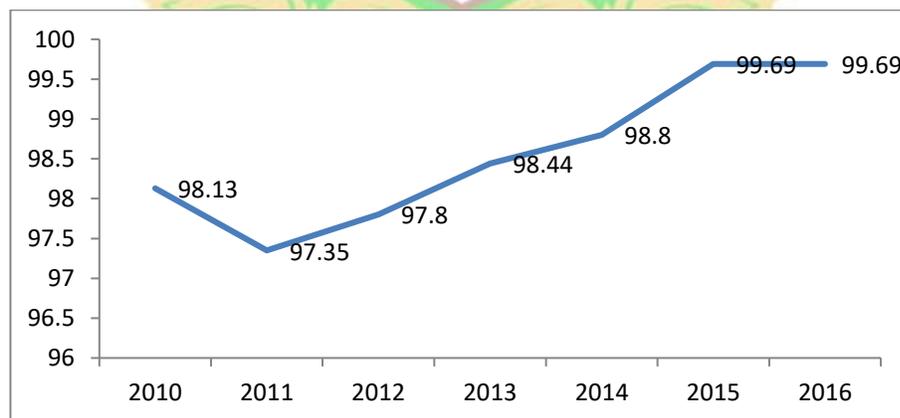
Gambar 1.1 PDRB per Kapita Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota



Sumber : BPS, 2017

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, tidak terlepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada Gambar.1 dimana adanya perbedaan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. PDRB perkapita yang cukup tinggi rata-rata wilayah perkotaan. Sedangkan, tingkat perkembangan PDRB perkapitanya cukup rendah rata-rata wilayah perdesaan. Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi adalah contoh wilayah perkotaan yang memiliki PDRB perkapita yang cukup tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan pusat kegiatan berbagai bidang perekonomian. Sementara Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat adalah contoh wilayah perdesaan yang memiliki PDRB perkapita yang rendah dikarenakan wilayah tersebut memiliki tingkat produksi perekonomian yang masih rendah. Keadaan ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2016.

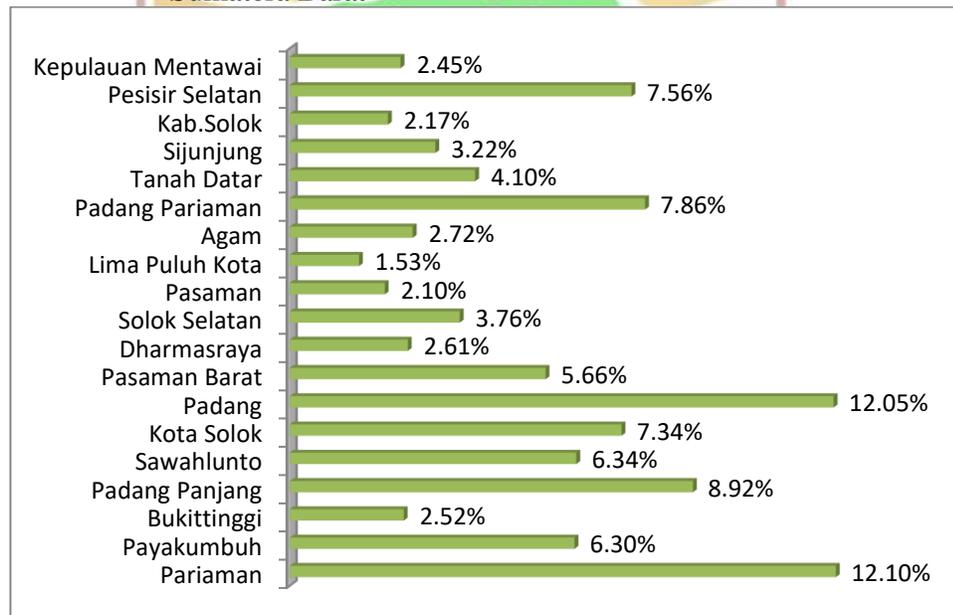
Gambar 1.2 Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Barat 2010-2016



Sumber : BPS, 2017

Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Barat juga akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Dari Gambar 1.2 kita dapat melihat bahwa pada tahun 2010, angka melek huruf Sumatera Barat yaitu sebesar 98,13%. Namun pada tahun 2011, angka melek huruf Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,78. Pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan dan pada tahun 2016, angka melek huruf Sumatera Barat meningkat sebesar 99,69%.

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat



Sumber : BPS, 2017

Tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional juga merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada bulan Agustus tahun 2014 mencatat nilai TPT sebesar 5,94%. Sementara dari data pada tahun yang sama, terdapat 11

kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki TPT lebih rendah dibandingkan TPT nasional hal ini dapat dilihat pada gambar. 1.3. 11 Kabupaten/kota tersebut antara lain Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Bukittinggi. 8 Kabupaten/Kota lain yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan kota Pariaman memiliki TPT lebih besar.dibandingkan dengan TPT nasional.

Pemerintah perlu memainkan peran desentralisasi fiscal tentang distribusi dari daerah kaya ke daerah miskin dalam mengatasi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan yang tajam. Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Proses pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mengalami permasalahan ketimpangan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Maka perlu adanya peran pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai pemerataan sehingga ketimpangan antar wilayah di Sumatera Barat dapat berkurang.

Dalam mengacu pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan Sumatera Barat periode 2011-2016. Sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2016?
2. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2016.
2. Menganalisis pengaruh dari PDRB perkapita, angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat terhadap beberapa komponen yaitu; terhadap peneliti sendiri, bagi pemerintah, dan bagi peneliti berikutnya.

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memahami permasalahan mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih alternative kebijakan yang akan diambil untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah.

3. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan ketimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat tahun 2010-2016. Adapun faktor-faktor yang diteliti adalah PDRB perkapita, Angka Melek Huruf dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Penelitian ini menggunakan data panel berupa data sekunder kuantitatif 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada rentang waktu antara tahun 2010-2016 dan juga laporan-laporan dari dinas terkait. Alasan mengapa memilih periode tersebut karena ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian terpenuhi.

